

**MODUL
MATA KULIAH
EKONOMI PEMBANGUNAN**

**Di Susun Oleh :
Rifki Khoirudin**

**Prodi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Ahmad Dahlan
2022**

PENDAHULUAN

- A. Ekonomi Pembangunan :** merupakan pandangan-pandangan para ekonomi mengenai aspek yang terkait dengan masalah pembangunan di negara sedang berkembang (NSB)
, meliputi Bidang :
- masalah pertumbuhan ekonomi, masalah kemiskinan, masalah pembentukan modal, masalah pengeralahan tabungan, masalah bantuan luar negeri.

Secara umum ekonomi pembangunan membahas :

1. Pembahasan tentang pembangunan ekonomi (deskriptis & analitis) untuk memberi gambaran berbagai sifat perekonomian di Negara Sedang Berkembang dan implikasinya.
2. Memberi berbagai pilihan pola kebijakan pembangunan yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di Negara sedang berkembang.

Definisi Ekonomi Pembangunan : Cabang Ilmu Ekonomi yang meng-analisis masalah-masalah yang di-hadapi Negara Sedang

Berkembang dan mencari cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut agar negara tersebut dapat membangun ekonominya lebih cepat.

B. Ciri-ciri Umum Negara Sedang Berkembang (TODARO)

1. Standar hidup yang rendah : dapat dilihat dari :
 - Pendapatan Nasional Perkapita = tolok ukur kesejahteraan ekonomi suatu negara : < US\$ 500
 - distribusi pendapatan nasional tidak merata
 - tingkat kemiskinan masih tinggi
 - kesehatan rendah (kekurangan gizi/ malnutrisi)
 - pendidikan yang masih rendah

2. Produktivitas yang rendah, sebagai akibat dari :
 - standar hidup rendah
 - kurangnya skill dan manajemen karena pelatihan dan pendidikan rendah

3. Tingkat pertumbuhan penduduk dan beban ketergantungan yang tinggi
 - tingginya angka kelahiran : 30–40 per 1000 orang 2 % per tahun
 - tingginya beban ketergantungan : 40 % penduduknya adalah anak-anak

4. Tingginya tingkat pengangguran & pengangguran semu

Pengangguran Semu : orang yang bekerja kurang dari apa yang seharusnya dapat dikerjakan

Pengangguran terbuka : orang yang ingin bekerja tetapi tidak ada lapangan pekerjaan

5. Ketergantungan pada produksi pertanian & ekspor produk barang primer
 - tahun 1997 60 – 80% NSB ,penduduknya hidup dipedesaan,
 NM = < 35 %
 60% bekerja di sektor pertanian = 25 % sumbangan terhadap PDB
 - Ekspor ke negara maju = 70 % merupakan produk primer : makan, bahan baku, BBM., bahan logam

6. Kekuasaan, ketergantungan = vulnerabiliy dalam hubungan–hubungan internasional
 - Ketimpangan kekuasaan antara negara maju >< negara miskin akibatnya vulnerability (mudah terpengaruh)

C. Pembangunan Ekonomi & Pertumbuhan Ekonomi :

TODARO = 3 nilai pokok keberhasilan pembangunan ekonomi

1. berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok (basic needs).
2. meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia.
3. meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memiliki.

Pembangunan Ekonomi = suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai perbaikan sistem kelembagaan.

Pertumbuhan Ekonomi = kenaikan GDP/GNP dalam 1 tahun (dibahas lebih lanjut)

D. Metode Perhitungan Pendapatan Nasional

- Gross Domestic Product (GDP) = Produk Domestik Bruto (PDB) = Hasil produksi barang dan jasa dalam wilayah suatu negara.
- Gross National Product (GNP) = Produk Nasional Bruto (PNB) = Hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara tertentu baik di dalam maupun di luar negeri.

GDP > GNP = maka investasi asing lebih besar.

E. Rumus Menghitung PDB, PNB, PNN, Pendapatan Nasional, Individu Dan

Pendapatan Dapat Dibelanjakan

Di bawah ini adalah rumus untuk menghitung secara agregat Produk Domestik Bruto / PDB, Produk Nasional Bruto / PNB, Produk Nasional Netto / PNN, Pendapatan Nasional / PN, Pendapatan Individu dan Pendapatan Yang Dapat Dibelanjakan. Semua disertai arti definisi / pengertian masing-masing istilah.

1. Menghitung Produk Domestik Bruto / PDB / Produk Domestik Kotor

Pengertian Produk Domestik Bruto atau PDB adalah hasil output produksi dalam suatu perekonomian dengan tidak memperhitungkan pemilik faktor produksi dan hanya menghitung total produksi dalam suatu perekonomian saja.

Rumusnya adalah:

$$\underline{PDB = C + G + I + (X - M)}$$

atau

$$\underline{\text{produk domestik bruto} = \text{pengeluaran rumah tangga} + \text{pengeluaran pemerintah} + \text{pengeluaran investasi} + (\text{ekspor} - \text{impor})}$$

2. Menghitung Produk Nasional Bruto / PNB / Produk Nasional Kotor

Pengertian Produk Nasional Bruto adalah hasil produksi dalam suatu wilayah yang telah dikurangi hasil faktor produksi yang pemiliknya bukan berasal dari dalam perekonomian serta ditambah nilai faktor produksi dari dalam perekonomian yang berada di luar daerah perekonomian.

Rumus hitung PNB yaitu :

$$\text{Produk Nasional Bruto} = \text{PDB} + \text{hasil faktor produksi milik domestik yang ada di luar negeri} - \text{hasil output faktor produksi milik luar negeri yang ada di dalam negeri}$$

3. Menghitung Produk Nasional Netto / PNN / Produk Nasional Bersih

Pengertian Produk Nasional Netto adalah produk nasional yang memperhitungkan pengeluaran investasi neto dengan mengurangi investasi bruto dengan depresiasi.

Rumus PNN yakni :

$$\text{Produk Nasional Netto} = \text{Produk Nasional Bruto} - \text{Depresiasi}$$

4. Menghitung Pendapatan Nasional / PN

Pendapatan Nasional merupakan pendapatan yang memperhitungkan balas jasa atas faktor produksi dengan mengurangi produk nasional neto dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi.

Rumus PN :

$$\text{Pendapatan Nasional} = \text{Pendapatan Nasional Netto} - \text{Pajak Tidak Langsung} + \text{Subsidi}$$

5. Pendapatan Personal / Individu / Perseorangan / PP

Pengertian Pendapatan Nasional adalah hak individu yang merupakan balas jasa atas proses produksi yang dijalani. Dari keseluruhan pendapatan nasional yang ada tidak sepenuhnya milik perseorangan, karena sebagian merupakan hak dari perusahaan seperti laba ditahan, penerimaan bukan balas jasa, pembayaran asuransi sosial dan pendapatan bunga perseorangan dari pemerintah dan konsumen.

Rumus PP :

$$\text{Pendapatan Personal} = \text{Produk Nasional Netto} - \text{Laba Ditahan} - \text{Pembayaran Asuransi Sosial} - \text{Penerimaan Bukan Balas Jasa} - \text{Pendapatan Bunga Dari Konsumen dan Pemerintah}$$

6. Pendapatan Personal Yang Dapat Dibelanjakan

Pengertian Pendapatan Personal Disposable adalah penghasilan individu dalam suatu perekonomian yang bersih dan sudah bisa dibelanjakan secara keseluruhan setelah pendapatan nasional dikurangi dengan pajak penghasilan perseorangan.

Rumus pendapatan perorangan yang dapat dibelanjakan :

$$\text{Pendapatan personal yang dapat dibelanjakan} = \text{pendapatan personal} - \text{pajak pendapatan personal.}$$

Cara Perhitungan Pendapatan Nasional ;

1. Metode produksi (Nilai tambah / value added):

Menghitung faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu, di Indonesia waktu selama 1 tahun meliputi 11 sektor = pertanian, industri pengolahan, pertambangan & galian, listrik, air dan gas, bangunan, pengangkutan & komunikasi, perdagangan, bank & LK, sewa rumah, pertahanan & jasa-jasa lainnya.

PDB dalam rupiah = penjualan dari nilai tambah (VA) yang dihasilkan oleh masing-masing sektor menurut lapangan usaha.

2. Metode Pendapatan = Pendapatan Nasional dihitung dari menjumlahkan pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam memproduksi barang & jasa-jasa.

Faktor-faktor produksi = tanah, modal tenaga & wiraswasta diberi balas jasa masing-masing dengan nama :

Sewa, bunga, upah/gaji, laba.

Faktor-faktor ini dimiliki oleh seseorang maka kembali ke masyarakat sebagai pendapatan nasional, metode ini disebut juga GNI (Gross National Income)

Contoh : Klasifikasi penghasilan

| Siapa yang menerima | apa yang diterima |
|-----------------------------------|--------------------|
| Karyawan (swasta + pemerintah) | gaji / upah |
| Pengusaha (usaha sendiri) | laba usaha sendiri |
| Perusahaan (PT, NV, Firm) | laba perusahaan |
| Pemilik modal (Pemerintah/Swasta) | Sewa bunga |

INDIKATOR PEMBANGUNAN

1. Indikator Moneter

Pendapatan Perkapita :

Pendapatan perkapita adalah pendapatan nasional di bagi dengan jumlah penduduk, merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Indikator keberhasilan pembangunan non ekonomi = atas istiadat, keadaan iklim dan alam sekitarnya, kebebasan pendapat & bertindak (kelemahan pendapatan perkapita)

Kelemahan metodologi pendapatan perkapita =

- perbedaan umur penduduk, distribusi pendapatan nasional, metode perhitungan pendapatan, perbedaan nilai mata uang (Kurs) dengan dollar AS

2. Indikator kesejahteraan ekonomi bersih.

Wil. Nordhaus & J. Tobin (1972) dengan teorinya Net Economic Welfare (NEW) sebagai penyempurnaan nilai GNP dengan cara koreksi positif & negatif.

Koreksi positif = nilai GNP harus memperhitungkan waktu senggang & perkembangan sektor ekonomi informal.

Koreksi negatif = nilai GNP harus melihat kerusakan lingkungan.

3. Indikator Non Moneter

1. Indikator Sosial

Gilbert & Kravis = membandingkan tingkat kesejahteraan & pem-bangunan di beberapa negara dengan memperbaiki metode perbandingan dengan menggunakan data pendapatan nasional masing-masing negara

Beckermen = membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai negara dengan data yang bukan ber-sifat moneter (indikator non moneter yang di sederhanakan / Modified non menotary indicators)

Data tersebut adalah : berdasarkan jumlah konsumsi & persediaan barang
(Jumlah konsumsi baju, semen, jumlah surat, radio,
telepon, kendaraan, daging dalam satu tahun).

1970 United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) di Swis. Indeks taraf pembangunan di negara maju dengan NSB dengan 18 jenis : (tahun harapan hidup, konsumsi protein hewani, prosentase anak belajar, jumlah surat kabar, telp, rado, penduduk di kota, persentase lahir, persetase tenaga kerja, PDB dari manufacture, konsumsi energi, listrik, dll).

1990 United Nations for Development Program (UNDP) mengembangkan indeks Pembangunan manusia (Human Dev. Index) dengan data :

1. Tingkat harapan hidup,
2. Tingkat melek huruf,
3. Tingkat pendapatan riil perkapita.

1992 BPS Indikator campuran : Susenas meliputi sosial & ekonomi.

Antara lain : Pendidikan, kesehatan, perumahan, Angkatan kerja, KB & fertilitas, ekonomi, kriminalitas, wisata, akses media masa.

2. Indikator Ekonomi

- a) Pendapatan Perkapita
- b) Struktur Ekonomi
- c) Urbanisasi
- d) Angka Tabungan
- e) Indeks Kualitas Hidup (IKH)
- f) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

TEORI PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

- A. Madzhab Historismus** : melihat pembangunan ekonomi berdasar pada pendekatan yang berpangkal pada sejarah penganutnya : Jerman.
1. **Friedrich List** : pelopor Historismus,
 - perkembangan ekonomi tergantung pada peran pemerintah, organisasi swasta & lingkungan budaya, yang membebaskan masyarakat untuk berorganisasi politik & kebebasan perorangan.
 - Perkembangan ekonomi (Cara produksi) : primitif, beternak, pertanian, pertanian & manufactur, pertanian manufactur dan perdagangan. Daerah iklim sedang & kepadatan penduduk sedang cocok untuk industri, sebaliknya untuk tropis tidak cocok karena panas dan kepadatan penduduk tinggi.
 2. **Bruno Hildebrand** : menekankan evolusi dalam perekonomian masyarakat.
3 Sistem distribusi : perekonomian barter, perekonomian uang, perekonomian kredit.
 3. **Karl Bucher** : Sintesa dari List & Hildebrand
Perekonomian ekonomi :
 1. Produksi untuk kebutuhan sendiri (sub sistem).
 2. Perekonomian kota yang pertukaran sudah meluas.
 3. Perekonomian nasional peran pedangan menjadi penting .
 4. **Walt Whitman Rostow** : dikenal dengan model jenjang linier.
Proses pembangunan ekonomi terbagi dalam 5 tahap :

- a. Tahap tradisional (traditional society) : cara produksi masih primitif, kebiasaan hidup yang turun temurun, produktivitas rendah, dominasi sektor pertanian, yang struktur sosialnya bersifat hierarkhis (kedudukan seseorang tergantung dari nenek moyangnya) kekuasaan politik dipengaruhi oleh tuan tanah.
 - b. Tahap Prasyarat Tinggal landas : yaitu masa transisi masyarakat untuk mempersiapkan diri mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri.
- 2 Corak :
- pola negara eropa, Asia, Timur Tengah & Afrika yang merubah masyarakat tradisional.
 - pola AS, Kanada, Australia, New Sealand, mencapai tinggal landas tanpa harus merubah tradisionalnya.

Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai apabila diikuti oleh perubahan dan lain-lain dalam masyarakat : seperti : ilmu pengetahuan, tabungan & wiraswasta, perubahan teknik & produksi, pengambilan resiko.

Kenaikan investasi terjadi apabila diikuti perubahan struktur ekonomi syarat tinggal landas : memajukan sektor pertanian, membangun prasarana umum, kepemimpinan yang positif.

- c. Tahap Tinggal Landas : - pesatnya kemajuan ekonomi karena inovasi-inovasi baru, pasar-pasar baru, peningkatan investasi, peningkatan pendapatan perkapita.
- 3 Ciri utama tinggal landas :
1. Naiknya investasi produktif dalam PDB.
 2. Berkembangnya satu/beberapa sektor pemimpin (leading sector) dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi.
 3. Terciptanya kerangka dasar sosial, politik & kelembagaan yang menciptakan sektor modern & eksternalistik ekonomi

Disamping 3 faktor di atas, faktor modal dalam negeri juga penting untuk mengurangi modal luar negeri.

- d. Tahap menuju Kedewasaan : masyarakat sudah menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi.
- Karakteristik non ekonomis masyarakat yang sudah menuju kedewasaan.

1. struktur & keahlian tenaga kerja mengalami perubahan, peranan industri semakin naik, pertanian menurun.
 2. Sifat kepemimpinan dalam perusahaan berubah, peran manajer profesional menggantikan pemilik modal.
 3. Kritik-kritik terhadap industrialisasi muncul akibat dampak dari industrialisasi.
- e. Tahap Konsumsi Tinggi : menekankan masalah konsumsi & kesejahteraan masyarakat bukan pada produksi.
- 3 tujuan masyarakat :
1. Memperbesar kekuasaan & pengaruh ke luar negeri yang cenderung menjajah negara lain.
 2. Menciptakan negara kesejahteraan dengan cara pembagian pendapatan yang merata melalui pajak progresif.
 3. Meningkatkan konsumsi masyarakat melebihi kebutuhan pokok.
- AS mencapai tahap ini tahun 1920, Inggris tahun 1930, Jepang & Eropa Barat tahun 1950.

B. Madzhab Analitis : mengungkapkan proses pertumbuhan ekonomi secara logis & konsisten, sering bersifat abstrak & kurang empiris.

1. Teori Klasik : berpendapat bahwa mekanisme pasar akan secara otomatis menjadikan perekonomian berjalan secara efisien. Hal ini sejalan dengan lahirnya Revolusi Industri saat itu. Tokohnya adalah :

Adam Smith (1723 – 1790) :

untuk berlangsungnya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi/pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah, namun sebelum adanya spesialisasi perlu ada akumulasi kapital yang berasal dari investasi & tabungan, setelah produktivitas meningkat maka perlu ada perluasan pasar (dalam & luar negeri).

David Ricardo (1772-1823) :

Masyarakat ekonomi menjadi 3 : golongan kapitalis, golongan buruh & golongan tuan tanah, maka Pendapatan Nasional juga di bagi 3 yaitu upah, sewa & keuntungan, maka dia membedakan PDB & PNB.

T.R. Malthus :

Dengan adanya kenaikan jumlah penduduk, maka permintaan bertambah, namun harus juga diikuti dengan kenaikan investasi yang berasal dari tabungan.

J.S. Mill :

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah :

1. faktor-faktor non ekonomi : adat, kepercayaan masyarakat.
2. Ada tidaknya masyarakat yang kreatif.
3. Ada tidaknya pengetahuan.

2. Teori Schumpeter : perkembangan ekonomi merupakan perubahan spontan & terputus-putus (discontinou) karena adanya gangguan keseimbangan, oleh karena itu perlu adanya inovator-inovator :

1. mengemukakan/mengenalkan barang baru
2. mengenalkan metode produksi yang baru.
3. pembukaan pasar baru
4. penemuan sumber ekonomi baru
5. menjalankan organisasi baru dalam industri.

3. Teori R.F. Harrold & Eusey Domar :

Akumulasi kapital dalam pembangunan berfungsi ganda yaitu : menimbulkan pendapatan & menaikkan kapasitas produksi.

Investasi output + tenaga kerja pendapatan
nasional = keseimbangan full employment.

4. Teori Ketergantungan :

Lahir tahun 1960 an di Amerika Latin, sebagai protes atas sistem ekonomi kapitalis yang menciptakan negara-negara pinggiran, yang merupakan negara jajahan negara maju, sebagai produsen-produk bahan mentah bagi negara maju & sebaliknya konsumen barang-barang jadi yang dihasilkan industri-industri negara maju.

2. Madzhab Teori Ketergantungan : 1). Aliran Marxis & Neo Marxis

2). Aliran Non Marxis.

- Aliran Marxis dalam konsepnya terjadi pertentangan antara pemilik modal (kapitalis) dengan para buruh (Proletar). Kaum Proletar perlu menumbangkan kekuasaan golongan kelas pemerintah yang menjadi alat pusat metropolitan dengan cara revolusi.
- Aliran Non Marxis melihat ketergantungan dari perspektif rasional atau regional dengan membedakan struktur dalam & luar negeri.

Kesimpulan : negara-negara pinggiran tergabung ke dalam sistem ekonomi kapitalis sebab keterbelakangan negara-negara berkembang sehingga menjadi daerah jajahan (Kolonialisme) negara-negara maju sehingga menyebabkan ketergantungan "negara" miskin terhadap negara maju.

III. B. Kebijakan Pembangunan Ekonomi

Syarat-syarat perkembangan ekonomi menurut BALDWIN & MEIER ada 6 :

1. **Indegenous Forces**(Kekuatan dari dalam) untuk berkembang kekuatan dari dalam masyarakat berupa psikologis, sosial, budaya dan lain-lain, merupakan penentu pembangunan, ditambah bantuan dari luar sebagai pelengkap.
2. **Mobilitas Faktor-Faktor Produksi**, dengan cara :
 - mengganti bentuk-bentuk organisasi sosial & ekonomi
 - memberi kesempatan menaikkan produktivitas
 - menaikkan teknologi
 - mengurangi monopoli
 - fasilitas kredit, kapital dipermudah

Pengarahan dan penggunaan semua sumber-sumber secara efisien salah satunya adalah Sumber Daya Alam.

Sumber Daya Alam (SDA) :

Macam Sumber Daya Alam :

1. Sumber Daya Alam yang dapat diganti/diperbaharui :
Contoh : hutan, kualitas tanah,
2. Sumber Daya Alam yang tidak dapat diganti/diperbaharui :
Contoh : logam, minyak bumi, batu bara

Sumber Daya Alam merupakan input yang penting dalam produksi disektor industri, pertanian maupun sektor jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Semakin banyak prneduduk, semakin banyak barang & jasa yang harus disediakan terutama dari sumber daya alam dengan proses produksi yang meningkat tersebut akan menghasilkan pula pencemaran lingkungan, yang pada jangka panjang mengganggu kesehatan manusia atau mengurangi kesejahteraan manusia.

Pengelolaan Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui : pengambilan atau penggunaan SDA saat sekarang bergantung nilai biaya (Opportunity cost) yaitu yang akan diperoleh pada masa depan.
Harga SDA (tidak dapat diperbaharui) = biaya produksi marjinal + biaya alternatif.

sementara untuk SDA yang dapat diperbaharui,
harga = biaya produksi marjinal.

Beberapa hal penting dalam mengelola Sumber Daya Alam :

1. biaya pengambilan/penggalian menjadi semakin tinggi dengan semakin mempunyai persediaan Sumber Daya Alam tersebut.
2. Kenaikan dalam biaya pengambilan/penggalian Sumber Daya Alam akan lebih kecil dengan adanya penemuan deposit baru dan teknologi baru.
3. Sebidang tanah tidak hanya bernilai tinggi karena adanya Sumber Daya Alam (mineral,minyak dll) yang terkandung di dalamnya, tetapi juga "opportunity cost" berupa keindahan alam di tempat tersebut.

Perlu dibedakan antara penggunaan Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui.

Disamping 4 hal di atas perlu juga dilihat eksternalitas SDA yaitu polusi atau pencemaran lingkungan, untuk menanggulangi hal ini perlu campur tangan pemerintah yang menerapkan kebijakan tertentu.

Faktor-faktor ekonomi yang menghambat optimum dari SDA :

1. tidak tersedianya kapital
2. organisasi manajemen yang kurang profesional
3. distribusi yang murang memadai

4. bentuk pasar yang tidak tepat (contoh : monopoli, regulasi)

3. Akumulasi Kapital :

- naiknya volume tabungan
- mekanisme kredit dari lembaga-lembaga keuangan
- struktur pasar yang kuat untuk mobilitas, alokasi & penyaluran kapital

SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

1. Tabungan Dalam Negeri Sumber : Tabungan perusahaan & Tabungan rumah tangga
2. Tabungan Luar Negeri Sumber : Tabungan pemerintah asing (LN) dan tabungan swasta asing
3. Investasi dan Pertumbuhan
4. Efisiensi penggunaan modal
5. Sumber dana dari luar negeri : pemerintah / swasta
6. Bantuan luar negeri

4. Kriteria & Arah Investasi :

1. perbandingan antara kapital output rasio terendah
2. penggunaan tenaga kerja yang tinggi
3. mengurangi kesulitan neraca pembayaran internasional

FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI

1. Akumulasi modal
2. Pertumbuhan penduduk
3. Kemajuan teknologi

Ada 3 macam klasifikasi kemajuan teknologi :

1. Netral
2. Hemat tenaga kerja (*Labor Saving*)
3. Hemat modal (*Capital Saving*)

5. Penyerapan Kapital & Stabilitas : Penyerapan kapital suatu negara dilihat dari :

1. tersedianya faktor produksi komplementer yang terkait dengan kapital
2. menghindari inflasi & mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran.

Keterbatasan penyerapan kapital bagi Negara Sedang Berkembang
karena

:

1. kurangnya teknologi
2. kurangnya tenaga ahli
3. kurangnya tingkat mobilitas geografi yang rendah

6. Nilai dan lembaga-lembaga yang ada (Non ekonomi) :

1. perubahan tradisi/kebiasaan
2. perubahan organisasi sosial (kasta, sistem irigasi, kredit, panen)

III. C. Pengertian pembangunan ekonomi daerah

Pembangunan ekonomi daerah di era otonomi menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, seperti masalah kesenjangan dan iklim globalisasi. Yang disebut belakangan ini menuntut tiap daerah untuk mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kesenjangan dan globalisasi berimplikasi kepada propinsi dan kabupaten/kota, untuk melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi daerah secara terfokus melalui pengembangan kawasan dan produk andalannya. Percepatan pembangunan ini bertujuan agar daerah tidak tertinggal dalam persaingan pasar bebas, seraya tetap memperhatikan masalah pengurangan kesenjangan. Karena itu seluruh pelaku memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan keterkaitan antarsektor, antarprogram, antarpelaku, dan antardaerah.

Kawasan Andalan, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional¹ adalah suatu kawasan yang dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan antardaerah melalui pengembangan kegiatan ekonomi yang diandalkan sebagai motor penggerak pengembangan wilayah. Kawasan Andalan diharapkan mampu menjadi pusat dan pendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan di sekitarnya.

Kawasan andalan juga diharap mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kemampuan bersaing ini lahir melalui pengembangan produk unggulan yang kompetitif di pasar domestik maupun global, yang didukung

sumber daya manusia (SDM) unggul, riset dan teknologi, informasi, serta keunggulan pemasaran. Sementara itu dalam pelaksanaan di daerah, konsep pengembangan kawasan andalan tidak secara efektif dikembangkan, sehingga tidak pernah dapat diukur keberhasilannya. Maka dibutuhkan model-model pengembangan ekonomi daerah dengan pendekatan kawasan andalan, yang memiliki konsep pengembangan yang terfokus dan terpadu, terutama berorientasi pada karakteristik potensi kawasan dan kemampuan pengembangan kawasan. Pengembangan Kawasan Andalan dalam pelaksanaannya tidak secara efektif dikembangkan. Program pengembangan wilayah telah banyak dikembangkan, namun kurang optimal, karena menekankan pada sisi pengelolaan project oriented, kurang terfokus pada kesinambungan program jangka panjang, serta terhadap masalah-masalah lainnya.

1. paradigma baru teori pembangunan daerah

Tujuan kajian ini adalah mengembangkan model pengelolaan dan pengembangan keterkaitan program dalam pengembangan ekonomi daerah berbasis kawasan andalan. Sasaran yang dituju dari kajian adalah:

- (1) mengidentifikasi prinsip dasar pengembangan kawasan andalan;
- (2) mengidentifikasi faktor kunci dalam pengembangan kawasan andalan sesuai dengan karakter daerah;
- (3) menyusun masukan bagi kebijakan dan strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan andalan.

2. teori pertumbuhan dan pembangunan daerah

Pada tahap ini, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, pengelolaan, faktor kunci dan pola keterkaitan rantai nilai dalam pengembangan kawasan, dan program-program sektoral propinsi di tiap kawasan andalan.

1 Kawasan Andalan Rengat Kuala Enok (Kawan RKE)

Sektor yang berperan penting adalah pertanian dan industri yang dikembangkan melalui sistem keterpaduan. Dari sisi pengembangan, Kawan RKE lebih memperhatikan pada faktor kunci SDM, pasar dan pengembangannya, akses terhadap modal dan infrstruktur, kerjasama

antarinstitusi, serta iklim usaha. Faktor R&D sebagai tulang punggung kawasan belum diperhatikan. Keterkaitan agroindustri sendiri, sebagai industri pendorong, lebih tercipta pada hulu-hilir produksi-industri-pasar. Program-program sektoral sebagian besar berada di tingkat propinsi dan banyak terkait pada faktor akses ketersediaan faktor produksi. Faktor kunci SDM, R&D, pasar, dan iklim usaha kurang diperhatikan. Bahkan faktor kerjasama dan kemitraan tidak diperhatikan sama sekali. Keterkaitan program-program sektoral itu sendiri lebih berada pada komponen penunjang, terutama infrastruktur, dibandingkan dengan komponen utama. Aktivitas output tidak ada sama sekali.

2 Kawasan Andalan Priangan Timur (Kawan Priatim)

Kawasan Priatim mempunyai empat sektor bisnis inti, yaitu agribisnis, kelautan, pariwisata, dan industri kecil menengah, yang dalam pengelolaannya bermuara pada Pembangunan ekonomi daerah di era otonomi menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, seperti masalah kesenjangan dan iklim globalisasi. Yang disebut belakangan ini menuntut tiap daerah untuk mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kesenjangan dan globalisasi berimplikasi kepada propinsi dan kabupaten/kota, untuk melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi daerah secara terfokus melalui pengembangan kawasan dan produk andalannya. Percepatan pembangunan ini bertujuan agar daerah tidak tertinggal dalam persaingan pasar bebas, seraya tetap memperhatikan masalah pengurangan kesenjangan. Karena itu seluruh pelaku memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan keterkaitan antarsektor, antarprogram, antarpelaku, dan antardaerah. Kawasan Andalan, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional¹ adalah suatu kawasan yang dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan antardaerah melalui pengembangan kegiatan ekonomi yang diandalkan sebagai motor penggerak pengembangan wilayah. Kawasan Andalan diharapkan mampu menjadi pusat dan pendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan di sekitarnya. Kawasan andalan juga diharap

mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kemampuan bersaing ini lahir melalui pengembangan produk unggulan yang kompetitif di pasar domestik maupun global, yang didukung sumber daya manusia (SDM) unggul, riset dan teknologi, informasi, serta keunggulan pemasaran. Sementara itu dalam pelaksanaan di daerah, konsep pengembangan kawasan andalan tidak secara efektif dikembangkan, sehingga tidak pernah dapat diukur keberhasilannya. Maka dibutuhkan model-model pengembangan ekonomi daerah dengan pendekatan kawasan andalan, yang memiliki konsep pengembangan yang terfokus dan terpadu, terutama berorientasi pada karakteristik potensi kawasan dan kemampuan pengembangan kawasan. Pengembangan Kawasan Andalan dalam pelaksanaannya tidak secara efektif dikembangkan. Program pengembangan wilayah telah banyak dikembangkan, namun kurang optimal, karena menekankan pada sisi pengelolaan project oriented, kurang terfokus pada kesinambungan program jangka panjang, serta terhadang masalah-masalah lainnya.

3. paradigma baru teori pembangunan daerah

Tujuan kajian ini adalah mengembangkan model pengelolaan dan pengembangan keterkaitan program dalam pengembangan ekonomi daerah berbasis kawasan andalan. Sasaran yang dituju dari kajian adalah:

- (1) mengidentifikasi prinsip dasar pengembangan kawasan andalan;
- (2) mengidentifikasi faktor kunci dalam pengembangan kawasan andalan sesuai dengan karakter daerah;
- (3) menyusun masukan bagi kebijakan

4. perencanaan pembangunan daerah

Adapun faktor-faktor kunci untuk mengembangkan kawasan andalan, meliputi:

- (1) pengembangan SDM;
- (2) penelitian dan pengembangan;
- (3) pengembangan pasar,

- (4) akses terhadap sumber input atau faktor produksi,
- (5) adanya keterkaitan, kerjasama, dan kemitraan,
- (6) iklim usaha yang kondusif.

5. Tahap-tahap perencanaan pembangunan daerah

Selanjutnya konsep pengembangan wilayah setidaknya didasarkan pada prinsip:

- (1) berbasis pada sektor unggulan;
- (2) dilakukan atas dasar karakteristik daerah;
- (3) dilakukan secara komprehensif dan terpadu;
- (4) mempunyai keterkaitan kuat ke depan dan ke belakang;
- (5) dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi.

Pengembangan suatu wilayah harus berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal, sekaligus mengantisipasi perkembangan eksternal. Faktor-faktor internal meliputi :

pola-pola pengembangan SDM,
informasi pasar,
sumber daya modal dan investasi,
kebijakan dalam investasi,
pengembangan infrastruktur,
pengembangan kemampuan kelembagaan lokal dan pemerintahan,
serta berbagai kerjasama dan kemitraan.

Sedangkan faktor eksternal meliputi :

masalah kesenjangan wilayah dan pengembangan kapasitas otonomi daerah,
perdagangan bebas,
serta otonomi daerah.

Pengelolaan pengembangan kawasan andalan pada dasarnya adalah **meningkatkan daya saing kawasan dan produk unggulannya.**

Idealnya pengelolaan kawasan dimulai dengan menentukan visi dan misi pengembangan kawasan andalan. Kemudian disusun strategi pengembangan,

serta mengembangkan hubungan pemerintah dan dunia usaha.

Dalam hal ini diperlukan beberapa kebijakan, meliputi:

- 1) kebijakan investasi, yang terkait dengan produk unggulan kawasan, insentif, dan promosi;
- 2) kebijakan pengembangan kawasan, yang dilaksanakan melalui identifikasi faktor penentu pengembangan industri, formulasi visi pengembangan industri daerah, dan identifikasi strategi pendukung yang sesuai;
- 3) kebijakan perdagangan, yang mengatur hubungan perdagangan antardaerah dan antarsektor, serta meminimalisasi hambatan-hambatannya;
- 4) kebijakan pengembangan infrastruktur fisik dan non fisik (SDM);
- 5) kebijakan pengembangan kelembagaan, yang mencakup mekanisme pengambilan keputusan dilingkungan pemerintah, penciptaan regulasi, dan sosial dan budaya masyarakat.

6. Peran pemerintah dalam pembangunan daerah

Pengembangan wilayah merupakan berbagai upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup di wilayah tertentu, memperkecil kesenjangan pertumbuhan, dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Berbagai konsep pengembangan wilayah yang pernah diterapkan adalah:

1. Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumberdaya, yaitu:
 - (1) pengembangan wilayah berbasis sumberdaya;
 - (2) pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan;
 - (3) pengembangan wilayah berbasis efisiensi;
 - (4) pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan.
2. Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang, yang membagi wilayah ke dalam:
 - (1) pusat pertumbuhan;
 - (2) integrasi fungsional;
 - (3) desentralisasi.
3. Konsep pengembangan wilayah terpadu. Konsep ini menekankan kerjasama

antarsektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan

kemiskinan di daerah-daerah tertinggal.

4. Konsep pengembangan wilayah berdasarkan cluster.

Konsep ini terfokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku dal jaringan kerja produksi sampai jasa pelayanan, dan upaya-upaya inovasi pengembangannya. Cluster yang berhasil adalah cluster yang terspesialisasi, memiliki daya saing dan keunggulan komparatif, dan berorientasi eksternal. Rosenfeld (1997) mengidentifikasi karakteristik cluster wilayah yang berhasil, y adanya spesialisasi, jaringan lokal, akses yang baik pada permodalan, institusi penelitian dan pengembangan dan serta pendidikan, mempunyai tenaga kerja yang berkualitas, melakukan kerjasama yang baik antara perusahaan dan lem lainnya, mengikuti perkembangan teknologi, dan adanya tingkat inovasi yang tinggi. Untuk mengembangkan cluster, perlu dilakukan beberapa tindakan, yai

- (1) memahami kondisi dan standar ekonomi kawasan;
- (2) menjalin kerjasama;
- (3) mengelola dan meningkatkan pelayanan;
- (4) mengembangkan tenaga ahli;
- (5) mendorong inovasi dan kewirausahaan; dan
- (6) mengembangkan pemasaran dan memberi label khas bagi kawasan.

III. D. SUMBER DAYA MANUSIA

Elemen Pembangunan :

SDM : Sumber Daya Manusia

SDA : Sumber Daya Alam

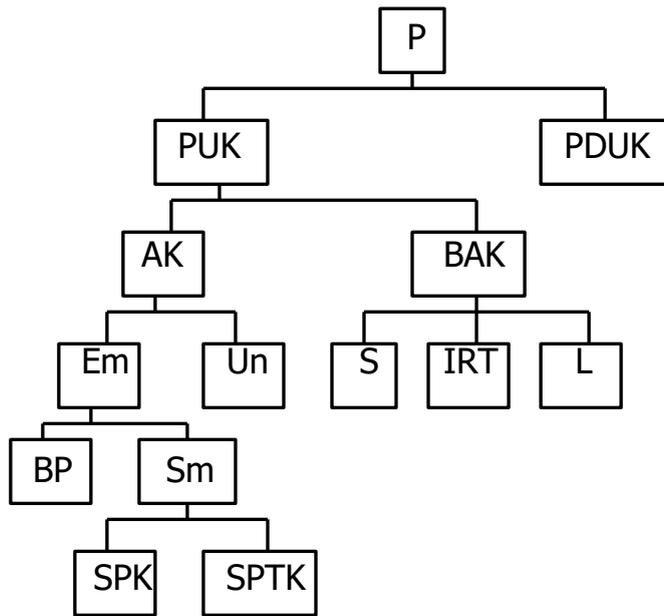
SDK : Sumber Daya Kapital

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk yang besar tidak otomatis akan menjadi modal Pembangunan, bahkan dapat menjadi beban/tanggungannya pendudukannya lainnya. Seperti Skema dibawah ini :

a

Penduduk & Tenaga Kerja



- P : Penduduk
- PUK : Penduduk Usia Kerja
- PDUK : Penduduk diluar usia kerja
- AK : Angkatan Kerja
- BAK : Bukan Angkatan Kerja
- S : Sekolah
- IRT : Ibu Rumah Tangga
- L : Lainnya
- Em : Bekerja
- Un : Unemployment
(belum mendapat kerja)
- BP : Bekerja Penuh
(> 35 jam/minggu)
- SM : Setengah Menganggur
(< 35 jam)
- SPK : Setengah penganggur
Kentara (< 14 jam/mgg)
- SPTK : Setengah Penganggur tak
Kentara = produktivitas
Rendah & pendapatan rendah

- **Indikator tingkat beban (dependency ratio)** yaitu tingkat beban yang harus ditanggung setiap penduduk produktif (10 th ke atas) dihitung dengan cara :

$$DR : \frac{PDUK \text{ (Penduduk diluar usia kerja)}}{PUK \text{ (Penduduk Usia Kerja)}}$$

- Ada sebagian tenaga kerja yang tidak menghasilkan produksi barang & jasa karena belum ingin menghasilkan atau belum mencari pekerjaan. Indikator ini disebut **TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)** dengan rumus :

$$TPAK : \frac{AK \text{ (Angkatan Kerja)}}{PUK \text{ (Angkatan Kerja)}} \times 100 \%$$

- Jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan / belum mendapat pekerjaan disebut pengangguran terbuka (**Open Unemployment/OU**) tingkat pengangguran terbuka ini dapat dihitung dengan rumus :

$$OU : \frac{Un \text{ (Unemployment)}}{AK \text{ (Angkatan Kerja)}} \times 100 \%$$

- Sedangkan rumus untuk menghitung tingkat **setengah pengangguran** adalah :

$$SP : \frac{K 35}{Em \text{ (Bekerja)}} \times 100 \% \quad (\text{setengah pengangguran})$$

$$SP : \frac{K 14}{Em \text{ (Bekerja)}} \times 100 \% \quad (\text{setengah pengangguran kritis})$$

Semakin tinggi tingkat setengah pengangguran memberi indikasi pemanfaatan sumber daya manusia semakin rendah dan sebaliknya. Indikator ini memberi gambaran realitas tentang keadaan angkatan kerja yang bekerja yang disebut Labour Utilization.

Pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia di Indonesia

SDM menentukan karakter dan langkah pembangunan suatu bangsa.

Prof. Frederick Harbison dari Princeton University mengemukakan:

SDM merupakan dasar kekayaan suatu bangsa.

Modal dan sumber daya alam (SDA) FP pasif

SDM FP aktif untuk mengolah, mengumpulkan modal, mengeksploitasi SDA, melaksanakan pembangunan.

Wanita dan pendidikan

peranan wanita

- dalam rumah tangga
- mendidik anak (generasi penerus)
- menyokong ekonomi keluarga

pentingnya pendidikan bagi wanita

Dampak Pendidikan terhadap pembangunan:

- Meningkatkan GNP
- Meningkatkan kualitas penduduk
- Pemerataan pendidikan: - biaya pendidikan dan manfaat
- Meningkatkan migrasi
- Perluasan kesempatan kerja
- Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan pedesaan

Bagaimana pendidikan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi:

- a. Menciptakan TK yang produktif dan memberikan latihan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill.

- b. Menyediakan pekerjaan yang menyebar dan kesempatan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi
- c. Mengadakan latihan dan pendidikan sambil mendorong sikap-sikap modern di berbagai lapisan masyarakat.

 **Investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan**

Investasi dalam sumber daya manusia.

Merupakan modal pembangunan bangsa.

IV. KEBIJAKAN FISKAL

Untuk mencapai tujuan pembangunan, ada berbagai kebijakan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain :

1. Kebijakan Fiskal
2. Kebijakan Moneter
3. Kebijakan Keuangan International

Ad.1. Kebijakan Fiskal adalah :

Arti dan Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara. Dari semua unsure APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal.

Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan:

jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

Ad.2. Kebijakan Moneter adalah :

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan uang beredar dalam masyarakat. Kebijakan ini mengacu keseimbangan dinamis yaitu antara uang yang beredar dengan barang & jasa dalam masyarakat.

Ad.3 Kebijakan Keuangan International adalah :

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan perdagangan & pembayaran Internasionalnya. Kebijakan ini berhubungan dengan neraca perdagangan, neraca pembayaran, menerima/memberikan bantuan luar negeri.

Kebijakan Fiskal :

- a). Pengeluaran Uang Negara dapat diklasifikasikan dalam :
1. Pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan & ketahanan ekonomi dimasa datang.
 2. Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan & kemakmuran masyarakat.
 3. Pengeluaran yang merupakan penghematan terhadap pengeluaran masa datang.
 4. Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang luas & menyebarkan daya beli yang luas.

Berdasarkan sifatnya, macam-macam pengeluaran negara antara lain :

1. Pengeluaran negara yang bersifat Self Liquidating (mampu memberi keuntungan). Yaitu berupa pemberian jasa pada masyarakat tetapi nantinya mendapat pembayaran kembali dari masyarakat berupa barang/jasa dari BUMN.
2. Pengeluaran negara yang bersifat Reproduktif yaitu yang berakibat masyarakat dapat melakukan usaha & meningkatkan penghasilannya, namun pemerintah nantinya akan mendapat pendapatan berupa pajak dan retribusi.
3. Pengeluaran negara yang tidak produktif yaitu membuat monumen, biaya perang, menumpas pemberontakan dll.
4. Pengeluaran untuk penghematan masa datang yaitu menyantuni anak yatim, apabila dimulai sejak dini biayanya lebih ringan dari pada setelah dewasa.

Setiap tahun Pengeluaran pemerintah cenderung meningkat, hal ini disebabkan antara lain :

1. menyelenggarakan demokrasi (pemilu)
2. menumpas pemberontakan & peperangan
3. program kesejahteraan sosial (subsidi)
4. mengatasi bencana alam
5. adanya urbanisasi, dan lain-lain.

Ad. 3 . Yaitu pemberian subsidi :

Nama lain dari subsidi adalah pajak negatif.

Pemberian subsidi dapat berupa :

- a. uang
- b. barang dengan harga lebih rendah.

b). Penerimaan Uang Negara.

Penerimaan Pemerintah dalam arti luas yaitu pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda, sumbangan masyarakat, cetak uang, undian negara, pinjaman pemerintah & hadiah (Suparmoko, 1986, h.94).

Pajak adalah partisipasi uang dari masyarakat langsung yang tidak mendapat imbalan dari pemerintah. Contoh : PBB.

Retribusi : partisipasi uang dari masyarakat langsung namun pemerintah memberikan imbalan . Contoh : Rekening listrik, retribusi pasar dll.

Sumbangan masyarakat contohnya adalah : biaya perizinan.

Pinjaman pemerintah (Hutang negara) berasal dari dalam negeri dan luar negeri, dari dalam negeri ada yang sifatnya memaksa dan ada yang suka rela, contohnya yang bersifat memaksa adalah Obligasi (surat tanda hutang) pemerintah yang mengharuskan warga tertentu untuk membelinya.

c). Fungsi Kebijakan Fiskal.

1. Fungsi Alokasi : yaitu fungsi pemerintah mengadakan alokasi terhadap sumber-sumber dana untuk mengadakan barang

kebutuhan perorangan dan sarana yang dibutuhkan untuk kepentingan umum, dengan tujuan agar terjadi keseimbangan antara uang yang beredar dengan barang/jasa dalam masyarakat.

2. Fungsi Distribusi : yaitu fungsi pemerintah untuk menyeimbangkan, menyesuaikan pembagian pendapatan & mensejahterakan masyarakat. Contoh : pajak progresif untuk membiayai sarana sosial, pendidikan, kesehatan, ketrampilan dll.
3. Fungsi Stabilisasi : yaitu fungsi pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja serta stabilitas harga barang kebutuhan masyarakat, menjamin meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

V. KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter ini berkaitan dengan nilai rupiah terhadap mata uang luar negeri (Kurs), aktivitas perbankan, investasi modal domestik dan modal asing, dll.

Tujuan Kebijakan moneter secara umum adalah :

1. Untuk menyesuaikan jumlah uang beredar dalam masyarakat
2. Untuk mengarahkan penggunaan uang & kredit sedemikian rupa sehingga nilai uang negara stabil.
3. Mendorong produsen meningkatkan produksi apabila kredit dengan bunga yang rendah.
4. Mempertahankan sekaligus meningkatkan employment.
5. kebijakan moneter yang diterapkan diusahakan tanpa memberatkan beban keuangan negara.

Instrumen Kebijakan Moneter antara lain :

1. Menetapkan Cash Ratio :
Yaitu menetapkan perbandingan presentase uang di Bank yang harus dijadikan cadangan & yang boleh dioperasikan. Uang cadangan di Bank disebut Reserve Requirement (RR). Kebijakan ini ditetapkan oleh Bank Indonesia yang mengakibatkan pengaruh berlipat ganda pada simpanan (deposit) yang disebut Multiplier Deposit.
2. Kebijakan pasar terbuka (Open Market Policy).
Yaitu berkaitan dengan penjualan surat-surat berharga dari bank Sentral apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, maka pemerintah akan menarik kembali dengan melalui kebijakan penjualan surat-surat berharga, dengan harga yang lebih rendah, sehingga masyarakat akan membelinya. Dengan demikian peredaran uang dalam masyarakat semakin berkurang, begitu juga sebaliknya.

3. Kebijakan Suku Bunga Kredit
Jika uang yang beredar dalam masyarakat tinggi, maka Bank Indonesia akan menetapkan suku bunga lebih tinggi, begitu juga sebaliknya.
4. Kebijakan Suku Bunga Deposito
Apabila uang yang beredar dalam masyarakat banyak, maka Suku Bunga Deposito dinaikkan agar masyarakat mau menyetor uangnya, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Hal ini dilakukan dengan cara : Pemerintah menetapkan TMP (Tight Money Policy) yaitu kebijakan uang ketat dengan membatasi pinjaman uang (liquiditas) Bank Umum dan Bank Sentral. Akibat kebijakan tersebut, kebutuhan uang Bank Umum diambil langsung dari masyarakat dengan cara menaikkan suku bunga deposito.

INFLASI & DEFLASI

Inflasi adalah suatu keadaan dimana nilai uang menurun secara terbuka karena harga barang-barang naik. Hal ini disebabkan karena jumlah uang yang beredar dalam masyarakat berlebihan. Tetapi kalau kenaikan harga barang bersifat sementara dinamakan Tekanan Inflatoir. Sebaliknya apabila kenaikan harga barang menaikkan harga faktor produksi (contoh : upah) & terus berlanjut keadaan ini disebut Hiper Inflasi / Spiral Inflasi.

Deflasi adalah kenaikan nilai uang secara terbuka, akibat harga menurun karena jumlah barang yang berlebihan.

Penyebab Inflasi dan Deflasi adalah :

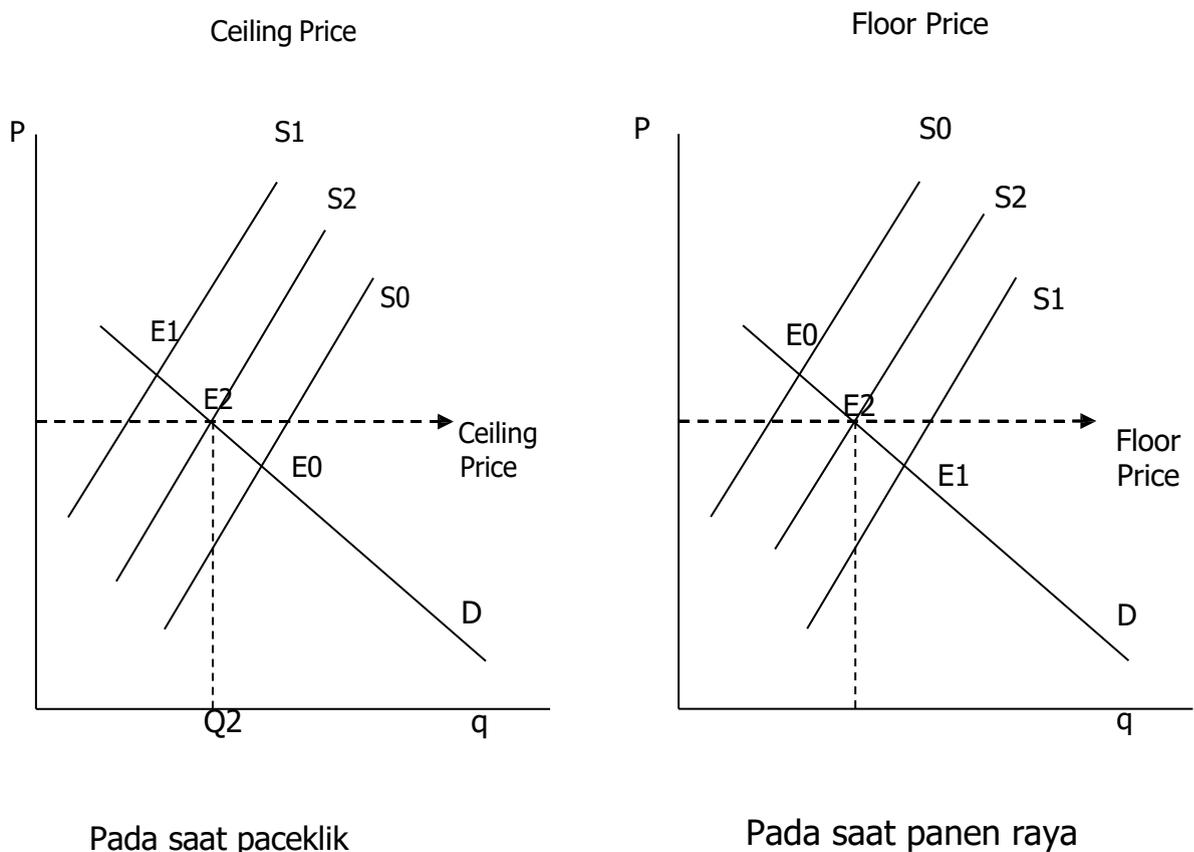
1. Penyebab dari Luar Negeri :
Jika ekspor lebih besar dari import, tanpa diimbangi bertambahnya barang/jasa, maka akan terjadi inflasi, sebab didalam negeri barang yang beredar akan berkurang. Sebaliknya jika ekspor lebih kecil dari import tanpa diimbangi beredarnya barang /jasa yang sama akan menyebabkan deflasi.
2. Penyebab Dalam Negeri :
Apabila realisasi kebijakan anggaran menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaannya, maka akan menyebabkan inflasi, tetapi jika pengeluaran pemerintah lebih kecil dari penerimaannya akan menimbulkan deflasi, karena jumlah uang yang beredar menjadi lebih sedikit.
3. Penyebab dalam Negeri : Sektor Swasta

Yang terutama berkait dengan tabungan, investasi & konsumsi. Jika pendapatan masyarakat lebih banyak digunakan untuk membeli barang/jasa maka akan mengarah pada inflasi. Jika masyarakat mengkonsumsi pendapatannya maka akan menambah jumlah uang yang beredar sehingga akan mengarah inflasi

KEBIJAKAN PERSEDIAAN PENYANGGA (Buffer Stock Policy)

Pemerintah berusaha agar rakyat tidak menderita karena harga-harga barang dipermainkan para tengkulak (orang-orang yang tidak bertanggung jawab). Contoh bidang pertanian, pada saat paceklik maka harga beras membumbung tinggi, sementara pada saat panen raya harga beras anjlok (menurun tajam). Untuk menstabilkan persediaan dan harga-harga bahan pokok tersebut pemerintah menerapkan kebijakan yang disebut Buffer Stock Policy dengan demikian harga maupun bahan akan tetap stabil.

Badan pemerintah yang menangani adalah Badan Urusan Logistik (BULOG) untuk tingkat nasional dan Depot Logistik (DOLOG) untuk Regional, dengan jalan menetapkan harga dasar tertinggi (ceiling Price) pada saat paceklik dan menetapkan harga dasar terendah (Floor Price) pada saat panen raya.



VI. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Sejak Orde Baru APBN kita disusun atas dasar 3 prinsip yaitu prinsip berimbang (Balance Budget), prinsip dinamis dan prinsip fungsional, masing-masing prinsip ini diukur dengan cara perhitungan tertentu.

a. Prinsip anggaran berimbang (Balance Budget)

Yaitu sisi penerimaan sama dengan sisi pengeluaran, dimana defisit anggaran ditutup bukan dengan mencetak uang baru tetapi dengan pinjaman / bantuan luar

negeri. Cara menghitung anggaran berimbang adalah :

1. Menghitung tabungan pemerintah yaitu :

TP : PDN – PR

PDN : Penerimaan Dalam Negeri (penerimaan rutin) yaitu penerimaan migas, pajak-pajak dalam negeri (non migas)

PR : Pengeluaran Rutin (gaji pegawai, cicilan + bunga hutang LN)

2. Menghitung Defisit Anggaran Pembangunan (DAP)

DAP : AP – TP

AP : Anggaran Pembangunan (pengeluaran pembangunan)

3. Menghitung besarnya Bantuan Luar Negeri (BLN)

BLN : DAP

BLN : Bantuan Luar Negeri / Pinjaman / Hutang Luar Negeri (Penerimaan Luar Negeri / Official Development Assistance = ODA)

b. Prinsip Anggaran Dinamis

Ada 2 pengertian anggaran dinamis yaitu dinamis absolut dan relatif.

Anggaran dinamis absolut diartikan sebagai peningkatan jumlah tabungan pemerintah dari tahun ke tahun, sehingga mampu menggali sumber dalam negeri untuk pembiayaan pembangunan. Indikator ini bisa dilihat dalam laju pertumbuhan tabungan pemerintah selalu positif. Sedangkan anggaran dinamis relatif diartikan dengan semakin kecilnya persentase ketergantungan pembiayaan terhadap bantuan luar negeri dengan rumus :

$$R_i = \frac{BLN}{A_p} \times 100 \%$$

R_i = Persentase Ketergantungan Pembiayaan

BLN = Bantuan Luar Negeri

A_p = Anggaran / Pengeluaran pembangunan

c. Prinsip Anggaran Fungsional

Prinsip ini hampir sama dengan prinsip dinamis, yakni semakin dinamis anggaran dalam pengertian relatif maka semakin baik tingkat fungsionalitas bantuan luar negeri, karena semakin tidak tergantung pada sumber pembiayaan luar negeri.

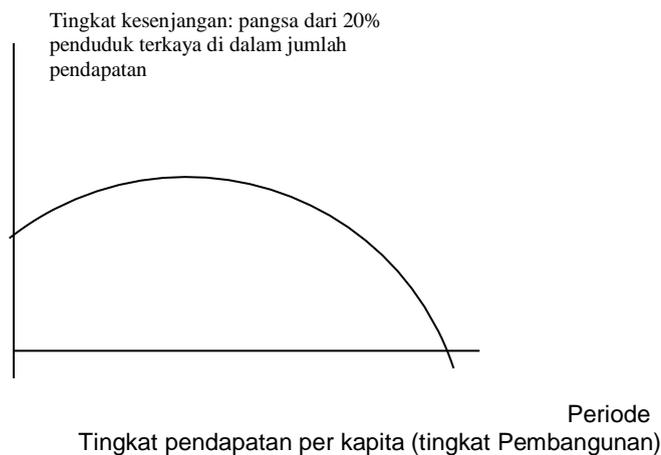
Karena fungsi bantuan luar negeri adalah untuk pembiayaan pembangunan bukan untuk biaya rutin.

VIII. DISTRIBUSI PENDAPATAN

Inti permasalahan pembangunan:

- penghapusan kemiskinan
- ketidakmerataan pembagian pendapatan

Menurut Kuznets, pada tahap awal pembangunan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan naik sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi dan pada akhir proses pembangunan ketimpangan menurun, yakni pada saat sektor industri di daerah perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar dari tenaga kerja yang datang dari pedesaan (sektor pertanian) atau pada saat pangsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan. Namun banyak faktor lain selain pertumbuhan yang juga mempunyai pengaruh besar terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah/negara, seperti struktur pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi.



Konsep dasar kemiskinan dan distribusi pendapatan

a. Kemiskinan Absolut:

Tingkat kehidupan yang berada dibawah standar kehidupan minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasarkan atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi.

| Klasifikasi | Garis kemiskinan dalam setara beras (Kg/kapita/th) |
|---------------|--|
| Miskin | 360 |
| Miskin sekali | 240 |
| Paling miskin | 180 |

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relative adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan. Tingkat kemiskinan tersebut dihitung dengan melihat proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh sekelompok penduduk dengan kelas pendapatan tertentu dibandingkan dengan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk dengan kelas pendapatan lainnya.

Kriteria Bank Dunia:

Ketidakmerataan tinggi 40% penduduk dengan pendapatan terendah menerima kurang dari 12% pendapatan nasional.

Ketidakmerataan sedang 12-12% (menerima

Ketidakmerataan rendah menerima lebih dari 17%

Faktor Penyebab Kemiskinan: lingkaran “setan” kemiskinan

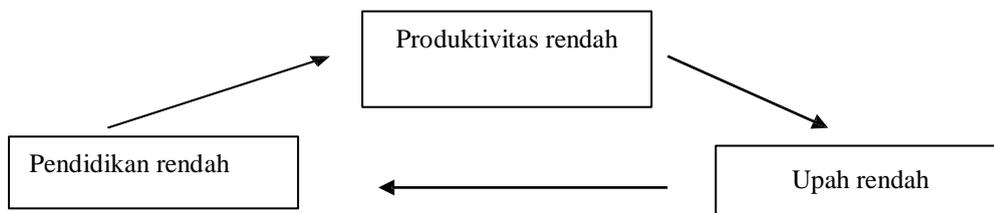
Faktor langsung:

1. Tingkat pendidikan yang rendah
2. Upah yang rendah
3. Produktivitas tenaga kerja yang rendah

Faktor tidak langsung:

1. Kesempatan kerja yang tersedia
2. Inflasi
3. Pajak dan subsidi
4. Penggunaan teknologi
5. Kondisi fisik alam suatu wilayah
6. Kultur/budaya
7. Politik
8. Bencana alam
9. Peperangan

Lingkaran “setan” kemiskinan:



Kenapa sektor pertanian merupakan pusat kemiskinan di Indonesia?

Faktor penyebabnya:

1. Tingkat produktivitas yang rendah karena jumlah pekerja di sektor tersebut terlalu banyak, sedangkan tanah, capital, teknologi terbatas dan pendidikan petani rendah
2. Daya saing petani atau dasar tukar domestic (term of trade) antara komoditi pertanian terhadap output industri semakin lemah.
3. Diversifikasi usaha di sektor pertanian ke jenis-jenis komoditi nonfood yang memiliki prospek pasar (terutama ekspor) dan harga yang lebih baik masih sangat terbatas.

KEMISKINAN

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line) merupakan dua masalah besar di banyak negara- negara berkembang (LDCs), tidak terkecuali di Indonesia.

JENIS-JENIS KEMISKINAN DAN DEFINISINYA

Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut.

Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan didalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan dibawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN

Tidak sulit mencari faktor-faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari faktor-faktor tersebut sangat sulit memastikan mana yang merupakan penyebab sebenarnya serta mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan

Tingkat dan laju pertumbuhan output

Tingkat upah neto

Distribusi pendapatan

Kesempatan kerja

Tingkat inflasi

Pajak dan subsidi

Investasi

Alokasi serta kualitas SDA

Ketersediaan fasilitas umum

Penggunaan teknologi

Tingkat dan jenis pendidikan

Kondisi fisik dan alam

Politik

Bencana alam

Peperangan

KEBIJAKAN ANTIKEMISKINAN

Untuk menghilangkan atau mengurangi kemiskinan di tanah air diperlukan suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat, dalam arti cost effectiveness-nya tinggi.

Ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni :

1. pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang prokemiskinan
2. Pemerintahan yang baik (good governance)
3. Pembangunan sosial

Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan yang bila di bagi menurut waktu yaitu :

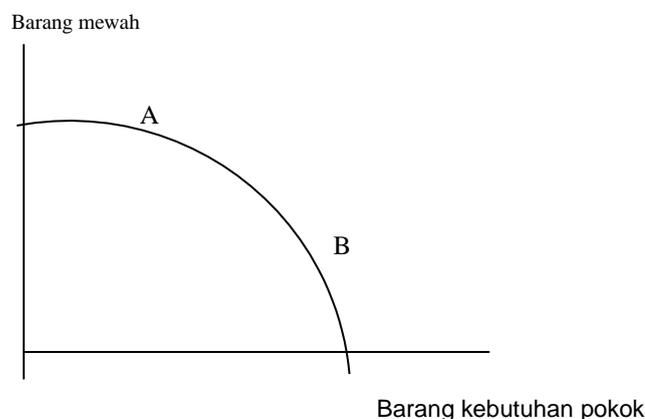
- a. Intervensi jangka pendek, terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan
- b. Intervensi jangka menengah dan panjang
 - o Pembangunan sektor swasta
 - o Kerjasama regional
 - o APBN dan administrasi
 - o Desentralisasi
 - o Pendidikan dan Kesehatan
 - o Penyediaan air bersih dan Pembangunan perkotaan

Pengukuran Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan:

1. Kurva Kemungkinan Produksi (Production Possibility Curve/PPC)

Kombinasi maksimum dari 2 macam barang tersebut yang bisa dihasilkan perekonomian itu dengan cara menggunakan semua sumber daya yang tersedia seefisien mungkin dengan teknologi tertentu.

Asumsi : hanya ada dua barang, yaitu barang kebutuhan pokok dengan barang mewah.



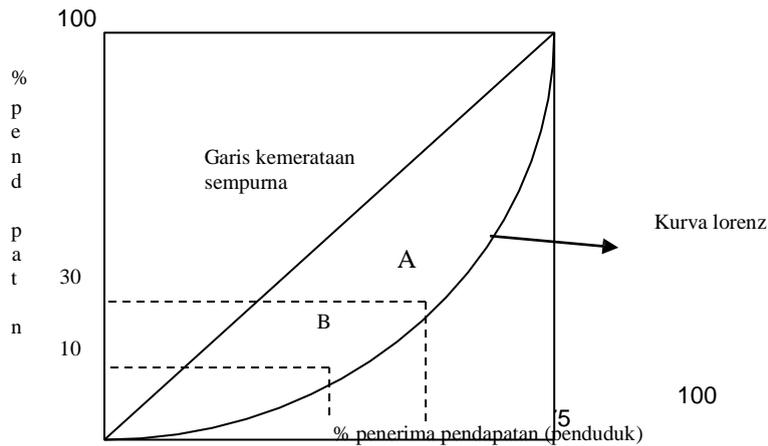
Posisi A (negara GNP tinggi) orang kaya, proporsi pengeluaran lebih banyak untuk barang mewah.
Posisi B (negara GNP rendah) orang miskin, proporsi pengeluaran lebih banyak untuk barang kebutuhan pokok.

2. Kurva Lorenz

menggambarkan hubungan antara kelompok penduduk dan pangsa (share) pendapatan mereka.

Sumbu horizontal : pangsa (share) pendapatan yang diterima oleh masing-masing % jumlah penduduk.

Sumbu vertikal : jumlah penerima pendapatan dalam % kumulatif.



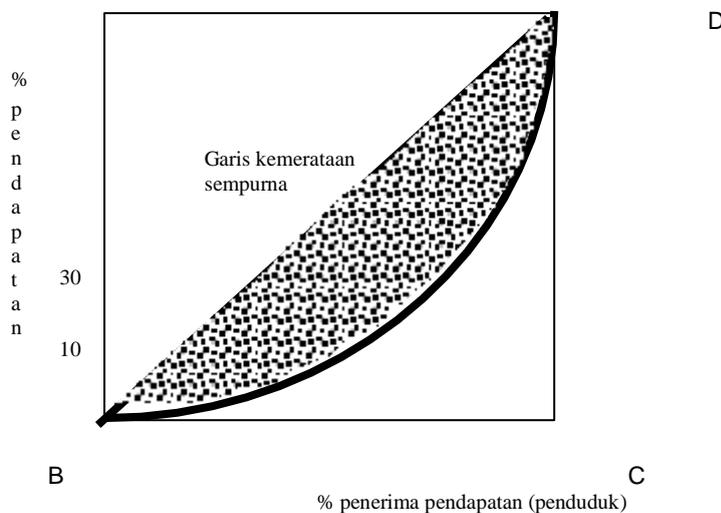
Garis diagonal: % pendapatan yang diterima =% penerima pendapatan tersebut
 A 75% penduduk menerima 30% dari jumlah pendapatan
 B 50% penduduk menerima 10% dari jumlah pendapatan

3. Koefisien Gini

Koefisien Gini: Suatu ukuran mengenai derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan suatu negara yang diperoleh dengan menghitung luas daerah antara garis diagonal dengan kurva Lorenz dibandingkan dengan luas total dari separuh bujur sangkar dimana terdapat kurva Lorenz tersebut.

Koefisien Gini= Daerah yang diarsir : Luas segitiga BCD
 Ukuran:

- 0 : pemerataan sempurna
- 1 : ketidakmerataan
- 0,5 – 0,7 : ketidakmerataan tinggi
- 0,36 – 0,49 : ketidakmerataan sedang
- 0,2 – 0,35 : ketidakmerataan rendah



Penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara Sedang Berkembang (menurut Irma Adelman dan Cynthia T. Morris):

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi
2. Inflasi tidak diikuti pertumbuhan produksi barang
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah
4. Investasi padat modal, sehingga meningkatkan pengangguran
5. Rendahnya mobilitas social
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang melindungi golongan kapitalis
7. Memburuknya nilai tukar bagi produk NSB
8. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dll.

Ada tiga pilar utama strategi untuk mengurangi kemiskinan:

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pro kemiskinan
2. Pemerintahan yang baik (good governance)
3. Pembangunan social

Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan antaranya. Sasaran atau tujuan tersebut dapat dibagi menurut waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Jangka pendek

pembangunan sektor pertanian dan pedesaan.

manajemen lingkungan dan sumber daya alam (SDA) karena hancurnya SDA akan mengerem proses pertumbuhan ekonomi

pembangunan transportasi, komunikasi, energi dan keuangan, peningkatan keikutsertaan masyarakat dan proteksi social (termasuk pembangunan sistem jaminan sosial)

Jangka Menengah dan Jangka Panjang:

1. Pembangunan sektor swasta
2. Kerjasama regional (antar provinsi)
3. Manajemen pengeluaran pemerintah (APBN) dan Administrasi untuk meningkatkan cost effectiveness dari pengeluaran pemerintah.
4. Desentralisasi
5. Pendidikan dan Kesehatan
6. Penyediaan Air Bersih dan Pembangunan Perkotaan

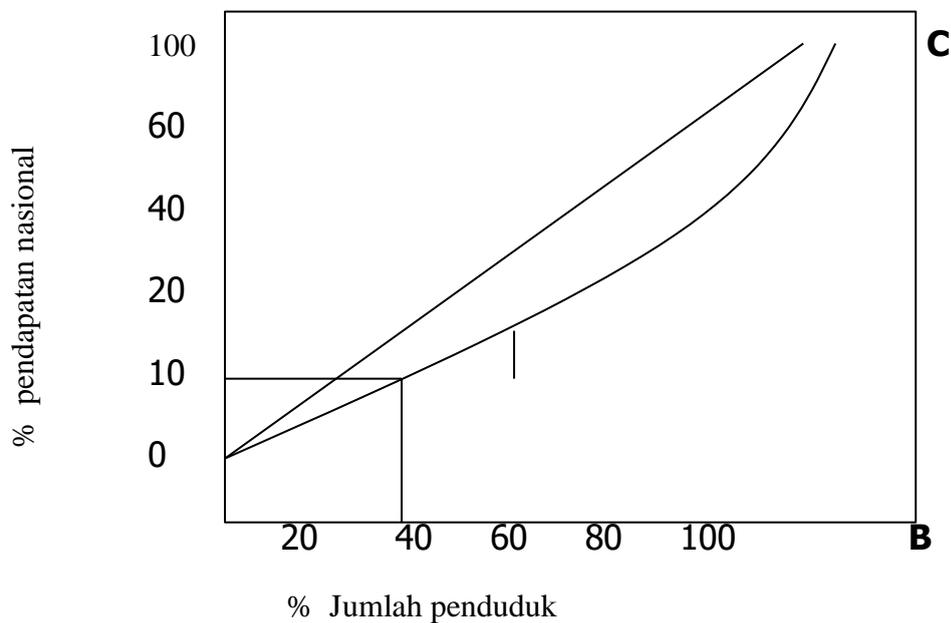
Prestasi pembangunan bisa diukur dari pendekatan ekonomi & non ekonomi. Pendekatan ekonomi antara lain pendapatan perkapita, pemerataan distribusi pembangunan & hasil-hasilnya (Distribusi pendapatan). Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan dikalangan penduduknya. Kriteria untuk menilai pemerataan yang lazim digunakan adalah :

1. Kurva Lorenz

Menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional dikalangan lapisan penduduk. Kurva ini terletak dalam sebuah bujursangkar, yang sisi vertikal

melambangkan prosentase kumulatif penduduk.

Kurvanya diletakkan diagram utama bujursangkar. Kurva yang semakin dekat diagonal (semakin lurus) artinya distribusi pendapatan nasional semakin merata. Sebaliknya yang semakin jauh dari diagonal tidak merata



2. Indeks atau Rasio Gini
Yaitu suatu koefisiensi berkisar antara angka 0 hingga 1 semakin kecil mendekati 0 koefisiennya, maka distribusi semakin merata, dan sebaliknya, adapun rumusnya adalah :

$$GR = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (X_{i+1} - X_i) (Y_i + Y_{i+1})}{1}$$

GR = Rasio Gini

F_i = proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i

X_i = proporsi jumlah kumulatif rumah tangga dalam kelas i

Y_i = proporsi jumlah kumulatif pendapatan dalam kelas i .

3. Indeks atau Rasio Gini
Berdasarkan pada porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk yaitu 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% berpendapatan menengah, 20% berpendapatan tinggi, tunjangan apabila 40% penduduk miskin menikmati < 12% PN sedang apabila 40% penduduk miskin menikmati 12 – 17 % PN, merata apabila 40% penduduk miskin menikmati < 17% PN.

Pendekatan-pendekatan Pembangunan :

1. Pembangunan Seimbang – Tidak Seimbang

Pembangunan Seimbang (balance growth), untuk mengejar industrialisasi di berbagai sektor, namun karena penduduk NSB tidak mempunyai modal cukup maka diperlukan Big Push yang dapat menampung permintaan secara menyeluruh dengan cara industrialisasi secara besar besaran bagi jenis industri tertentu yang saling mempunyai keterkaitan.

Pembangunan Tidak Seimbang (unbalance growth) menyarankan investasi pemerintah (terbatas dananya) pada satu sektor strategis yang mempunyai keterkaitan luas.

2. Teori Dependensia Internasional

NSB merupakan negara pinggiran (periphery) dari sistem ekonomi internasional, yang pusatnya dikuasai industri maju (NIM). Keterbelakangan NSB direayasa oleh negara maju, agar selalu tergantung pada lembaga-lembaga internasional milik NIM.

3. Teori Sustainable Development (Pembangunan yang berkesinambungan).

Pembangunan yang mementingkan kelestarian SDA dalam jangka panjang. Hal ini dapat tercermin dalam perbedaan tingkat harga antara SDA yang dapat diperbaharui & yang tidak dengan memilih teknologi yang tepat untuk menjaga dampak negatif dari penggunaan SDA.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kelima. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Balassa, Bela. (1961). Patterns of Industrial Growth: Comment, *American Economic Review*, Vol. 51(3), pp. 394-397.
- Beckerman, Wilfred. (1966). *International Comparisons of Real Income*. Paris: OECD Development Centre.
- Todaro, Michael P & Stephen C. Smith. (2003). *Economic Development*, Eight Edition. England: Pearson Education Limited.
- UNDP. (2019). *Human Development Report*.
- UNRISD. (1970). *Contents and Measurement of Socio-economic Development*. Geneva: UNRISD.